

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang sedang berkembang, Negara Indonesia dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman yang sedang terjadi pada saat ini, terutama pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dan sangat cepat meluas di dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya dalam dunia bisnis dan ekonomi, tetapi saat ini sudah lebih meluas ke berbagai bidang lainnya seperti di bidang pemerintahan, pelayanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan adanya teknologi dan informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang sangat diharapkan menjadi perubahan besar dalam bidang pemerintahan pada pelayanan publik sehingga di berbagai kegiatan tidak mengharuskan lagi untuk saling bertatap muka sehingga segala kegiatan yang dilakukan dapat lebih efektif dan efisien agar dapat menghemat dari segi biaya.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat peningkatannya serta potensi pemanfaatannya yang sangat luas juga, hal tersebut menjadi peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat. Selain itu perkembangan teknologi dan informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pekerjaan mengelola, mengolah, menyalurkan serta menyebarkan informasi publik secara yang dapat diakses dimana pun dan kapanpun. Sehingga hal tersebut menjadi penunjang hubungan baik antara Instansi Pemerintah dan masyarakat umum.

Pemerintah Kota Bandung juga menerbitkan berbagai kebijakan terkait ketenagakerjaan berupa menjamin hak dasar pekerja dalam kesamaan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan berupa adanya Pembinaan, Pelatihan serta penempatan kerja yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 13 Tahun 2003 dan tertulis pada Peraturan Menaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja pasal 3 bahwa bertujuan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi keahlian, keterampilan, minat, bakat dan kemampuan dengan mempehatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

Melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Kebijakan ini sifatnya praktis, dimana didalam isinya telah memuat Langkah-langkah yang diperlukan Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam melaksanakan pengembangan *E-Government* secara nasional yang berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional. dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu *E-Government* bertujuan untuk mendukung menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah agar pelaksanaan pemerintah dan pembangunan tersebut benar-benar memiliki

manfaat dan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas, juga pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan itu sendiri memerlukan suatu upaya keberlanjutan dan kesinambungan. Kemudian perubahan demi perubahan mulai tercipta. Kebijakan *E- Government* mulai diberlakukan di beberapa instansi pemerintah dari tingkat Departemen hingga Kabupaten Kota. Instansi Pemerintah bertujuan menunjang kebutuhan publik yang efektif dan efisien dengan mulai menggunakan teknologi informasi sebagai alat yang memudahkan pekerjaan sesuai kebutuhan dan tujuan pembangunan yang sudah direncanakan.

Pelaksanaan *E-Government* tidak terlepas dari peran sistem informasi. Salah satu sarana dalam penyampaian informasi yaitu melalui *website* dan aplikasi karena mudah diakses dan bebas. Pengembangan *website* dan aplikasi selalu diupayakan oleh pemerintah, dengan berbagai kebutuhan yang disesuaikan dengan kondisi. Pengembangan *website* dan aplikasi untuk menunjang E-government, tidak selalu dilakukan oleh pemerintah pusat bahkan Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam pengembangan tersebut. Pengembangan *website* dan aplikasi untuk menunjang E-government, tidak selalu dilakukan oleh pemerintah pusat bahkan Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam pengembangan tersebut.

Termasuk Kota Bandung yang menjadi wilayah provinsi Negara Indonesia dengan keadaan sekarang ini juga mengalami sebuah Perkembangan teknologi dimanapun dan kapanpun dari tahun ke tahun atau dari masa ke masa perubahan itu semakin nyata. Perkembangan itu harus terlihat perannya dalam

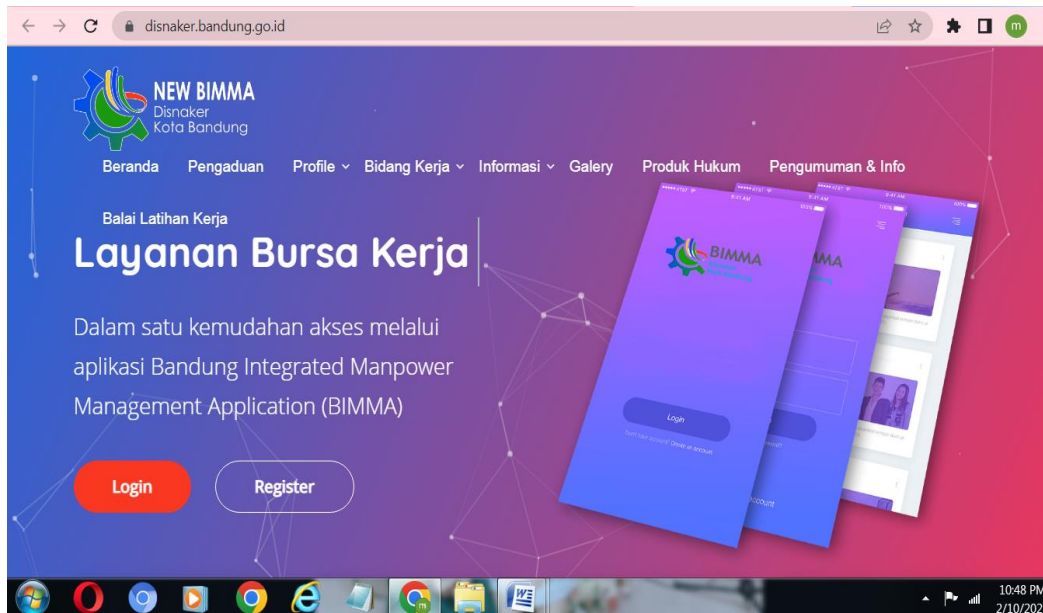
membantu organisasi pemerintah untuk menjadi lebih efisien , serta sebagai alat memenangkan kompetisi maupun membuat sebuah inovasi dalam menangani sebuah masalah. Hal ini Pemerintah Kota Bandung berhasil melaksanakan penerapan *E-Government* yang dikembangkan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dengan penerapannya berlandaskan pada PERWALI Kota Bandung No.73 Tahun 2019 UPT Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung mengenai terkait lingkup Latihan kerja yang berperan menjadi wadah berbasis digital dalam menciptakan individu berkompeten dengan adanya pelatihan yang profesional untuk bersaing dalam dunia kerja dengan membuat Aplikasi Bursa Kerja *Online* yang diberi nama Bandung *Integrated Manpower Management Application* (NEW BIMMA) yang menjadi wadah bagi para pencari kerja untuk mencari lowongan pekerjaan dengan layanan yang diberikan yaitu AK- 1 atau Kartu Kuning, Pendaftaran Peraturan Perusahaan, Pelatihan Kerja, Pengesahan pemagangan hingga mediasi terkhusus pada penempatan di berbagai perusahaan yang telah terdaftar dengan proses pengembangan keamanan data yang menggunakan SSL (*Secure Socket Layer*) telah tersertifikasi serta berfungsi untuk mengenkripsi dan mengacak informasi tersebut sehingga tidak akan bisa dibaca oleh pihak tertentu serta menjaga kerahasiaan data baik pencari kerja maupun perusahaan yang terkait. Lalu dalam menginput data identity melalui HTTPS (*Hypertext Transfer Protocol Secure*) supaya data yang diinput tidak dapat tercuri oleh hacker dan menggunakan Bandung.go.id yang terdaftar di website pemerintahan untuk menghindari manipulasi website. Aplikasi NEW BIMMA Launching. pada tanggal 29 November 2021 di Hotel Papandayan, Jalan

Gatot Subroto. Portal Bursa Kerja *Online* yang dapat diunduh langsung oleh Masyarakat/Para pengguna dengan sangat mudah melalui telepon genggam di *Google Play Store* dan juga tersedia dalam bentuk *website url* <https://disnaker.bandung.go.id/>. Tujuan dari aplikasi NEW BIMMA ini antara lain:

- (1) menyediakan informasi pasar kerja bagi masyarakat;
- (2) meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja Masyarakat Kota Bandung;
- (3) memudahkan Pengelolaan Data tenaga kerja dan bursa kerja;
- (4) memudahkan dalam proses mencari pekerjaan dan Penerimaan Tenaga Kerja;
- (5) menciptakan daya saing Bursa kerja dengan aplikasi pencarian kerja kekinian.

Aplikasi NEW BIMMA memiliki tampilan yang menarik yang modern serta mudah dipahami oleh semua kalangan Masyarakat/Pengguna sehingga aplikasi ini juga nyaman untuk digunakan. Halaman depan aplikasi ini dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1
Tampilan Beranda *Bandung Integrated Manpower Management Application*
(NEW BIMMA)



Sumber : <https://disnaker.bandung.go.id/>

Berdasarkan Gambar 1.1 NEW BIMMA merupakan aplikasi yang dirancang pada tahun 2021 berupa media layanan digital berupa Bursa Kerja, Pelatihan, AK-1 Online yang lebih efektif dan efisien.

Gambar 1.2
Tampilan Log In *Bandung Integrated Manpower Management Application*
(NEW BIMMA)

Sumber : <https://disnaker.bandung.go.id/>

Setelah Pengguna sudah mengunduh Aplikasi NEW BIMMA pengguna diminta login untuk mendaftarkan akunnya terlebih dahulu dengan syarat mengisi data pribadi seperti Username , alamat email, Password, Nomor Induk Keluarga (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal lahir, memilih Jenis Kelamin, memilih Agama, memilih Kewarganegaraan, memilih Status, memilih Kecamatan, memilih Desa/ Kelurahan, Alamat Tempat tinggal, Nomor Telepon, dan terakhir mengisi Kode yang tertera, jika sudah mengisi lengkap sat Registrasi pilih Submit, selanjutnya pengguna sudah memiliki akun untuk Masuk *login* kembali mengisi Username / Alamat Email / Nomor Induk Keluarga (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah itu mengisi *password*, mengisi kode yang sudah tertera, saat *login juga*

terdapat pesan aktivasi email dikirimkan ke salah satu nomor atau email untuk verifikasi akun pengguna dari aplikasi jika sudah secara sempurna nantinya pelamar kerja dapat melihat lowongan kerja tersedia dari perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja pada pilihan “Bursa Kerja”.

Aplikasi NEW BIMMA tersedia Layanan :

1. Pelatihan dan Produktivitas Kerja
2. Penempatan Tenaga Kerja
3. Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
4. Pembinaan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

Selain itu juga Aplikasi BIMMA ini, tidak hanya layanannya berupa menyediakan lowongan pekerjaan saja tetapi masih banyak fitur layanan seperti

1. Pengajuan Padat Karya
2. Pencatatan Perselisihan
3. Uji Kompetensi
4. Pendaftaran Pemagangan
5. Mediasi
6. Layanan Pengaduan
7. Konfirmasi Pengaduan
8. Permintaan Informasi Publik

9. Pendaftaran Program Work In Tech Indonesia

10. Layanan Pemagangan

11. Layanan Pencari Kerja

Dan juga ada berbagai Pilihan “Bursa Kerja” seperti:

1. Lowongan Kerja

2. Lowongan Kerja Disabilitas

Tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa masalah yaitu pertama kurangnya komunikasi antara Aparatur Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung kepada Masyarakat masih belum tersampaikan dengan baik, yang menyebabkan beberapa Masyarakat masih kurang mengetahui sebuah kebijakan penggunaan Aplikasi NEW BIMMA. Dikarenakan penyampaian informasi yang dilakukan hanya sekali. Terdapat kendala dari Sulitnya saat login, Sulit Pendaftaran dengan Email atau data diri tidak kunjung terkirim ke email pribadi pengguna. Dan Lamban nya respon dari Operator Aplikasi NEW BIMMA terhadap aduan masyarakat yang terkadang dengan waktu yang lama..

Adapun Penelitian terdahulu tentang kebijakan penggunaan aplikasi pemerintahan, yang menjadi bahan referensi bagi peneliti saat ini. Pertama, Dewi Kurniasih, Tatik Fidowaty, dan Poni Sukaesih (2013) tentang pengaruh implementasi kebijakan *E-Government* terhadap kinerja aparatur kota cimahi pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa penerapan *E-Government* signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah di Kota Cimahi. Implementasi kebijakan *E-*

Government memberikan pengaruh sebesar 54,85% terhadap perubahan kinerja aparatur pemerintah di Kota Cimahi. Meskipun tidak terlalu besar, namun implementasi kebijakan *E-Government* merupakan salah satu faktor yang dominan dalam menentukan perubahan kinerja aparatur pemerintah di Kota Cimahi.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Saudari Citra Annisa, (2011) dengan judul Implementasi *E- Government* melalui Bursa Kerja Online pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan mengukur indikator penentu keberhasilan implementasi melalui keempat indikator tersebut dapat dilihat bahwa hubungan komunikasi anatar pemerintah sudah baik, komunikasi pemerintah kepada perusahaan dan masyarakat masih belum baik, dari segi sumber daya dan disposisi masih kurang baik, dan struktur birokrasi sudah berjalan baik, serta masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Bursa Kerja Online tersebut dalam mewujudkan pelayanan publik. Jadi fokus penelitian ini adalah Implementasi *E-Government* melalui Bursa Kerja Online di Depok.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh saudari Yosi Monikasari, (2019) dengan judul Program Pelatihan dan *Job Fair* dalam mengurangi jumlah pengangguran menurut perspektif ekonomi islam. Penelitian ini memfokuskan tiga hal yakni untuk (1) Menganalisis Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung dalam mengurangi jumlah pengangguran melalui program pelatihan dan job fair, (2) Menganalisis hasil pelatihan dan *job fair* dalam

mengurangi jumlah pengangguran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung. (3) Menganalisa kendala dan solusi program pelatihan dan job fair dalam mengurangi jumlah pengangguran. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitiannya yaitu bahwa (1) Program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja ada dua jenis yaitu berbasis kompetensi dan kemasyarakatan, sedangkan program penempatan dan perluasan tenaga kerja yaitu penyelenggaraan job fair, (2) hasil dari program pelatihan dan *job fair* mampu mengurangi jumlah pengangguran secara bertahap, (3) Kendala yang dihadapi peserta pelatihan kurang mengetahui adanya pelatihan, kurangnya tenaga pengajar, perusahaan tidak mengkonfirmasi lowongan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan anggaran yang tidak mencukupi.

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan *E-Government* di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung (Studi Kasus pada Bandung Integrated Manpower Management Application (NEW BIMMA)).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka untuk mempermudah proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah dilihat dari beberapa indikator sebagai sebagai berikut : Bagaimana implementasi kebijakan e-government di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung (Studi Kasus pada *Bandung Integrated*

Manpower Management Application (NEW BIMMA)) dilihat dari variable komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi?.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai “Implementasi Kebijakan *E-Government* di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung (Studi Kasus pada *Bandung Integrated Manpower Management Application* (NEW BIMMA)). Sedangkan tujuan yang dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Komunikasi antar organisasi dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung (Studi Kasus pada *Bandung Integrated Manpower Management Application* (NEW BIMMA))
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Sumber daya dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung (Studi Kasus pada *Bandung Integrated Manpower Management Application* (NEW BIMMA)).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Disposisi dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung (Studi Kasus pada *Bandung Integrated Manpower Management Application* (NEW BIMMA)).
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung (Studi Kasus pada *Bandung Integrated Manpower Management Application* (NEW BIMMA)).

1.4 Kegunaan Penelitian Maksud dan Tujuan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat secara teoritis maupun secara praktis. Berikut beberapa kegunaan pada penelitian ini :

1. Guna Teoritis

- a. Guna Teoritis atau akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan mengenai Implementasi Kebijakan *E-Government* di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung (Studi Kasus pada Bandung Integrated Manpower Management Application (NEW BIMMA)).
- b. Sebagai Sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari peneliti di program studi Ilmu Pemerintahan.

2. Guna Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai Implementasi Kebijakan *E-Government* di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung (Studi Kasus pada Bandung Integrated Manpower Management Application (NEW BIMMA)) secara praktis , diantaranya:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang

kebijakan *E-Government*. Di samping itu, peneliti ingin mengetahui dan membandingkan tingkat kesesuaian teori praktik yang terjadi di lapangan.

- b. Bagi Pemerintah Kota Bandung dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandung dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dalam meningkatkan pengelolaan *E-Government* terutama bidang ketenagakerjaan aplikasi NEW BIMMA menjadi lebih baik lagi.

- c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi perpustakaan dan bahan pembanding bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian berikutnya di bidang yang sama di masa mendatang.

- d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat/pengguna dapat berkerjasama lagi dengan pemerintah dalam memberikan masukan terkait pengelolaan system informasi terhadap aplikasi NEW BIMMA, dan memberikan daya peduli pada aplikasi ini.